



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP KAMPUNG KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5) serta Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD setiap Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1641);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.07/ 2021 tentang Tranfer Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD SETIAP KAMPUNG KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu Aparat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Kepala Kampung adalah Pimpinan Pemerintah Kampung.
8. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis yang disebut Urusan dan Seksi serta unsur kewilayahan yang disebut RT/ RW.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Rumus perhitungan ADD Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

$$\text{PAGU ADD} = 10\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan:

Pagu ADD = Pagu Alokasi Dana Desa suatu Kabupaten
 Dana Perimbangan = Jumlah Total Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten
 DAK = Dana Alokasi Khusus

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten ditetapkan sebesar Rp. 78.777.976.500 (Tujuh Puluh Delapan Milyar, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan Pembagian sebagai berikut:
- a. Besaran Alokasi Dana Desa Kampung Induk sebesar Rp. 38.902.976.500,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Juta, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - b. Besaran Dana Operasional Kampung Pemekaran sebesar Rp.39.875.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar, Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Pasal 3

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
- b. Jumlah penduduk, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan indeks kesulitan geografis Kampung.

BAB III TATACARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan untuk setiap Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- b. Jumlah Penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa.
- (2) Jumlah Penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 15% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk Kampung;
 - 35% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin Kampung;
 - 25% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Kampung; dan
 - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk indeks kesulitan geografis.
- (3) Formulasi penghitungan Besaran Alokasi Dana Desa suatu Kampung adalah sebagai berikut:

$$\text{ADD PerDesa} = (\text{Pagu ADD} - \text{Siltap}) \times ((15\% \times \text{JP}) + (35\% \times \text{JPM}) + (25\% \times \text{LW}) + (25\% \times \text{IKG}))$$

Keterangan:

Pagu ADD = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.

Siltap = Total Penghasilan Tetap se Kabupaten.

JP = Persentase Jumlah Penduduk Kampung yang bersangkutan terhadap Total Penduduk Kampung di Kabupaten.

JPM = Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kampung yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk miskin Kampung di Kabupaten.

LW = Persentase Luas Wilayah Kampung yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Kampung di Kabupaten.

IKG = Persentase Indeks Kesulitan Geografis Kampung terhadap total Indeks Kesulitan.
= Geografis Kampung di Kabupaten.

- (4) Data jumlah penduduk Kampung, luas Wilayah Kampung, jumlah penduduk miskin Kampung dan indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Kampung termuat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN ADD

Pasal 6

- Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Kampung.
- Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (dua puluh persen);
 - Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh persen).

- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKK tahap I dilaksanakan setelah Bupati Teluk Bintuni menerima Peraturan Kampung mengenai APBKampung dari Kepala Kampung.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKK tahap II dilaksanakan setelah Bupati Teluk Bintuni menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung.
- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKK tahap III dilaksanakan setelah Bupati Teluk Bintuni menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap II dari Kepala Kampung.
6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Permohonan pencairan ADD disampaikan secara tertulis melalui SKPD Pengelola ADD kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Permohonan pencairan ADD untuk tahap I harus dilampiri:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang terdiri atas:
 - 1) Laporan Realisasi Keuangan; dan
 - 2) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Distrik dan Kamtibmas
 - b. Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas:
 - 1) Rencana Anggaran Kegiatan Kampung (RAKK);
 - 2) Rencana Kerja Kegiatan Kampung (R3K); dan
 - 3) Rencana Anggaran Biaya
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKampung) Tahun Anggaran berjalan;
 - e. Nomor rekening Kas Kampung pada Bank Umum;
- (3) Surat Permintaan Pencairan.
- (4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) ADD dipergunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- (2) Rencana Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

- (3) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif;
- (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Anggota BAPERKAM, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Keterwakilan Perempuan dan Tokoh Masyarakat;
- (5) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dituangkan dalam usulan RPK Kampung;
- (6) RPK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kampung

BAB VI PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 9

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari Pengelolaan APB Kampung;
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Kaur Keuangan Kampung;
- (3) Kaur Keuangan Kampung dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan

BAB VII PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Teluk Bintuni;
- (2) Laporan Keuangan Kampung disusun menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan SISKEUDES dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaporan APB Kampung

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati Teluk Bintuni menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati Teluk Bintuni belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) atau Pasal 11 ayat (2);
 - b. Terdapat sisa ADD di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/ atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
- (5) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUDADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan ADD.
- (7) Kepala Kampung yang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban penggunaan ADD akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Distrik dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,
Tanda Tangan
PETRUS KASIHUW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 5 Januari 2022

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,
Tanda tangan
FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2022 NOMOR 3



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN: I
 PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG KABUPATEN
 TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR KAMPUNG INDUK/ DEFINITIV

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu ADD
1	2	3	4	5	6
1	Bintuni	Tusai	250,000,000	54,908,000.00	304,908,000.00
2	Bintuni	Argosigemerai	250,000,000	190,000,000.00	440,000,000.00
3	Bintuni	Beimes	250,000,000	69,837,700.00	319,837,700.00
4	Bintuni	Iguriji	250,000,000	66,043,358.00	316,043,358.00
5	Bintuni	Masina	250,000,000	59,722,000.00	309,722,000.00
6	Bintuni	Wesiri	250,000,000	100,715,672.00	350,715,672.00
7	Merdey	Merdey	250,000,000	70,001,500.00	320,001,500.00
8	Merdey	Meryeb	250,000,000	76,647,000.00	326,647,000.00
9	Merdey	Meyom	250,000,000	74,522,000.00	324,522,000.00
10	Merdey	Menggerba	250,000,000	76,803,500.00	326,803,500.00
11	Merdey	Anajero	250,000,000	74,882,000.00	324,882,000.00
12	Merdey	Morgromus	250,000,000	74,522,000.00	324,522,000.00
13	Merdey	Morombuy	250,000,000	79,487,500.00	329,487,500.00
14	Merdey	Mekiesefeb	250,000,000	85,872,000.00	335,872,000.00
15	Merdey	Meyetga	250,000,000	70,372,000.00	320,372,000.00
16	Babo	Irarutu III	250,000,000	129,573,700.00	379,573,700.00
17	Babo	Amutu	250,000,000	110,000,000.00	360,000,000.00
18	Babo	Nusei	250,000,000	115,000,000.00	365,000,000.00
19	Babo	Kasira	250,000,000	82,811,000.00	332,811,000.00
20	Aranday	Aranday	250,000,000	74,580,000.00	324,580,000.00
21	Aranday	Kampung Baru	250,000,000	73,077,000.00	323,077,000.00
22	Aranday	Kecap	250,000,000	80,458,000.00	330,458,000.00
23	Aranday	Manunggal Karya	250,000,000	70,900,900.00	320,900,900.00
24	Moskona Selatan	Jagiro	250,000,000	62,500,000.00	312,500,000.00
25	Moskona Selatan	Mayenda	250,000,000	70,500,000.00	320,500,000.00
26	Moskona Selatan	Rawara	250,000,000	67,800,000.00	317,800,000.00
27	Moskona Selatan	Barma Barat	250,000,000	69,500,000.00	319,500,000.00
28	Moskona Selatan	Inggof	250,000,000	75,000,000.00	325,000,000.00
29	Moskona Selatan	Moyeba	250,000,000	88,500,000.00	338,500,000.00
30	Moskona Selatan	Merestim	250,000,000	92,500,000.00	342,500,000.00
31	Moskona Selatan	Inofina	250,000,000	112,500,000.00	362,500,000.00
32	Moskona Selatan	Mosum	250,000,000	91,500,000.00	341,500,000.00
33	Wamesa	Wamesa I / Idor	250,000,000	104,500,000.00	354,500,000.00
34	Wamesa	Wamesa I / Yakati	250,000,000	101,500,000.00	351,500,000.00
35	Wamesa	Yansei	250,000,000	101,053,900.00	351,053,900.00
36	Wamesa	Mamuranu	250,000,000	89,500,000.00	339,500,000.00
37	Fafurwar	Fruata / Irowutu II	250,000,000	83,758,000.00	333,758,000.00
38	Fafurwar	Meryedi	250,000,000	85,750,000.00	335,750,000.00
39	Fafurwar	Riendo	250,000,000	89,750,000.00	339,750,000.00


40	Tembuni	Tembuni	250,000,000	71,500,000.00	321,500,000.00
41	Tembuni	Mogoi Baru	250,000,000	78,750,000.00	328,750,000.00
42	Tembuni	Araisum	250,000,000	88,450,000.00	338,450,000.00
43	Tembuni	Bangun Mulya	250,000,000	79,500,000.00	329,500,000.00
44	Kuri	Sarbe	250,000,000	115,667,000.00	365,667,000.00
45	Kuri	Waguru	250,000,000	95,831,000.00	345,831,000.00
46	Kuri	Refideso	250,000,000	86,064,000.00	336,064,000.00
47	Kuri	Naramasa	250,000,000	108,851,000.00	358,851,000.00
48	Kuri	Obo	250,000,000	83,340,970.00	333,340,970.00
49	Manimeri	Bumi Saniari	250,000,000	144,148,000.00	394,148,000.00
50	Manimeri	Banjur Ausoy	250,000,000	145,900,000.00	395,900,000.00
51	Manimeri	Waraitama	250,000,000	140,000,000.00	390,000,000.00
52	Manimeri	Atibo Manimeri	250,000,000	60,619,000.00	310,619,000.00
53	Manimeri	Pasamai	250,000,000	60,751,900.00	310,751,900.00
54	Manimeri	Karano Jaya	250,000,000	148,573,000.00	398,573,000.00
55	Tuhiba	Tuhiba	250,000,000	71,371,000.00	321,371,000.00
56	Tuhiba	Tisaida	250,000,000	75,140,900.00	325,140,900.00
57	Tuhiba	Kucir	250,000,000	75,240,000.00	325,240,000.00
58	Tuhiba	Sibena Raya	250,000,000	73,000,000.00	323,000,000.00
59	Tuhiba	Sibena Permai	250,000,000	78,122,000.00	328,122,000.00
60	Daratan Beimes	Horna	250,000,000	76,018,000.00	326,018,000.00
61	Daratan Beimes	Cumnaji	250,000,000	75,591,000.00	325,591,000.00
62	Daratan Beimes	Menci	250,000,000	75,653,000.00	325,653,000.00
63	Daratan Beimes	Sir	250,000,000	76,208,000.00	326,208,000.00
64	Daratan Beimes	Hus	250,000,000	76,430,000.00	326,430,000.00
65	Daratan Beimes	Ugdohop	250,000,000	76,779,000.00	326,779,000.00
66	Sumuri	Tofoi	250,000,000	130,000,000.00	380,000,000.00
67	Sumuri	Tanah Merah	250,000,000	132,077,000.00	382,077,000.00
68	Sumuri	Saengga	250,000,000	130,814,000.00	380,814,000.00
69	Sumuri	Forada	250,000,000	147,371,000.00	397,371,000.00
70	Sumuri	Materabu Jaya	250,000,000	124,037,000.00	374,037,000.00
71	Kaitaro	Sara	250,000,000	80,000,000.00	330,000,000.00
72	Kaitaro	Warga Nusa I	250,000,000	71,000,000.00	321,000,000.00
73	Kaitaro	Warga Nusa II	250,000,000	75,546,000.00	325,546,000.00
74	Kaitaro	Tugarama	250,000,000	72,500,000.00	322,500,000.00
75	Kaitaro	Suga	250,000,000	70,500,000.00	320,500,000.00
76	Aroba	Aroba	250,000,000	101,885,000.00	351,885,000.00
77	Aroba	Yaru	250,000,000	93,983,000.00	343,983,000.00
78	Aroba	Sido Makmur	250,000,000	117,500,000.00	367,500,000.00
79	Aroba	Wimbro	250,000,000	105,965,000.00	355,965,000.00
80	Aroba	Sangguar	250,000,000	100,100,000.00	350,100,000.00
81	Masyeta	Masyeta	250,000,000	65,231,000.00	315,231,000.00
82	Masyeta	Mestofu	250,000,000	65,700,000.00	315,700,000.00
83	Masyeta	Kalibiru	250,000,000	69,193,000.00	319,193,000.00
84	Masyeta	Mesomda	250,000,000	70,421,000.00	320,421,000.00
85	Biscoop	Jahabra	250,000,000	70,087,000.00	320,087,000.00
86	Biscoop	Ibori	250,000,000	70,496,000.00	320,496,000.00
87	Biscoop	Menyembru	250,000,000	70,289,000.00	320,289,000.00
88	Biscoop	Meyorga	250,000,000	65,448,000.00	315,448,000.00
89	Biscoop	Laudoho	250,000,000	65,077,500.00	315,077,500.00
90	Biscoop	Eniba	250,000,000	65,918,500.00	315,918,500.00

91	Biscoop	Mowitzka	250,000,000	65,037,000.00	315,037,000.00
92	Tomu	Sebyar Rejosasi	250,000,000	120,500,000.00	370,500,000.00
93	Tomu	Tomu	250,000,000	107,642,000.00	357,642,000.00
94	Tomu	Taroy	250,000,000	109,282,000.00	359,282,000.00
95	Tomu	Ekam	250,000,000	120,421,000.00	370,421,000.00
96	Kamundan	Kalitami I	250,000,000	110,319,000.00	360,319,000.00
97	Kamundan	Kalitami II	250,000,000	110,926,000.00	360,926,000.00
98	Kamundan	Kenara	250,000,000	100,171,000.00	350,171,000.00
99	Kamundan	Bibiram	250,000,000	114,826,000.00	364,826,000.00
100	Weriagar	Wariagar	250,000,000	111,500,000.00	361,500,000.00
101	Weriagar	Momotira	250,000,000	111,219,000.00	361,219,000.00
102	Weriagar	Wariagar Baru	250,000,000	100,500,000.00	350,500,000.00
103	Weriagar	Wariagar Utara	250,000,000	107,145,000.00	357,145,000.00
104	Weriagar	Tuanaikin	250,000,000	110,000,000.00	360,000,000.00
105	Moskona Barat	Meyerga	250,000,000	67,230,000.00	317,230,000.00
106	Moskona Barat	Macok	250,000,000	63,337,000.00	313,337,000.00
107	Moskona Barat	Istiwkem	250,000,000	60,758,000.00	310,758,000.00
108	Moskona Barat	Majnic	250,000,000	70,472,000.00	320,472,000.00
109	Meyado	Meyado	250,000,000	61,035,000.00	311,035,000.00
110	Meyado	Barma	250,000,000	70,179,000.00	320,179,000.00
111	Meyado	Barma Baru	250,000,000	67,001,000.00	317,001,000.00
112	Meyado	Vasco Damneen	250,000,000	66,587,000.00	316,587,000.00
113	Moskona Timur	Igomu	250,000,000	70,490,000.00	320,490,000.00
114	Moskona Timur	Mesna	250,000,000	70,873,000.00	320,873,000.00
115	Moskona Timur	Sumuy	250,000,000	70,040,000.00	320,040,000.00
			28,750,000,000	10,152,976,500	38,902,976,500

BUPATI TELUK BINTUNI

tanda tangan

PETRUS KASIH

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

 Di. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.
 NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN: II
 PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
 NOMOR 3 TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
 DESA SETIAP KAMPUNG KABUPATEN

DAFTAR KAMPUNG PEMEKARAN

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	PAGU ANGGARAN 2022	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5
1	Bintuni	Cutibo	Rp 275,000,000	3010214002434
2	Bintuni	Trimaroi	Rp 275,000,000	3010214002515
3	Bintuni	Didguij	Rp 275,000,000	3010214002460
4	Bintuni	Messin	Rp 275,000,000	3010214002456
5	Bintuni	Tehluwer	Rp 275,000,000	3010214002386
6	Bintuni	Hokut	Rp 275,000,000	3010214002412
7	Bintuni	Direb	Rp 275,000,000	3010214002471
8	Bintuni	Tubi/Sterira	Rp 275,000,000	3010214002541
9	Bintuni	Iguriji II	Rp 275,000,000	3010214002784
10	Bintuni	Asouw	Rp 275,000,000	3010214002611
11	Bintuni	Kampung Lama	Rp 275,000,000	3010214002526
12	Bintuni	Tolak	Rp 275,000,000	3010214002530
13	Bintuni	Kohoin	Rp 275,000,000	3010214002552
14	Bintuni	Rosib	Rp 275,000,000	3010214002390
15	Bintuni	Imrij	Rp 275,000,000	3010214002445
16	Bintuni	Awaba	Rp 275,000,000	3010214002423
17	Bintuni	Dagna	Rp 275,000,000	3010214002504
18	Merdey	Meyar	Rp 275,000,000	3010214001104
19	Merdey	Massy	Rp 275,000,000	3010214001200
20	Merdey	Meyewah	Rp 275,000,000	3010214001830
21	Merdey	Taugo	Rp 275,000,000	3010214001126
22	Merdey	Merifem	Rp 275,000,000	3010214001056
23	Merdey	Makmi	Rp 275,000,000	3010214001186
24	Merdey	Mereknusa	Rp 275,000,000	3010214001211
25	Merdey	Mosoima	Rp 275,000,000	3010214001841
26	Merdey	Kewisini	Rp 275,000,000	3010214001163
27	Merdey	Enejrenefa	Rp 275,000,000	3010214001815
28	Merdey	Mujui	Rp 275,000,000	3010214001141
29	Merdey	Marmey	Rp 275,000,000	3010214001826
30	Merdey	Mosodevef	Rp 275,000,000	3010214001115
31	Merdey	Meyokus	Rp 275,000,000	3010214001196
32	Merdey	Bomer	Rp 275,000,000	3010214001152
33	MERDEY	Meriraugt	Rp 275,000,000	3010214001174
34	Moskona Selatan	Meridey	Rp 275,000,000	3010214001966
35	Moskona Selatan	Meyodo	Rp 275,000,000	3010214002036
36	Moskona Selatan	Mesih	Rp 275,000,000	3010214002025
37	Moskona Selatan	Yahtiwa	Rp 275,000,000	3010214001992
38	Moskona Selatan	Mosusna	Rp 275,000,000	3010214002003
39	Moskona Selatan	Irahima	Rp 275,000,000	3010214001981
40	Moskona Selatan	Orosomna	Rp 275,000,000	3010214002095
41	Moskona Selatan	Momiefew	Rp 275,000,000	3010214001955
42	Moskona Selatan	Otawj	Rp 275,000,000	3010214001970
43	Moskona Selatan	Thimofro	Rp 275,000,000	3010214002014
44	Tembuni	Mauntob	Rp 275,000,000	3010214002062
45	Tembuni	Surru	Rp 275,000,000	3010214002051
46	Tembuni	Membera	Rp 275,000,000	3010214002084
47	Tembuni	Ciner	Rp 275,000,000	3010214002143
48	Tembuni	Bangun Harjo	Rp 275,000,000	3010214002121
49	Tembuni	Tussur	Rp 275,000,000	3010214002106


50	Babo	Madan Fisaura	Rp 275,000,000	3010214002600
51	Babo	Kanaisi	Rp 275,000,000	3010214002563
52	Aranday	Botonik	Rp 275,000,000	3010214001071
53	Aranday	Kandarin	Rp 275,000,000	3010214001082
54	Aranday	Yakora	Rp 275,000,000	3010214001292
55	Aranday	Irira	Rp 275,000,000	3010214001034
56	Moskona Utara	Moyeba Utara	Rp 275,000,000	3010214001572
57	Moskona Utara	Moyeba Barat	Rp 275,000,000	3010214001605
58	Moskona Utara	Moyeba Timur	Rp 275,000,000	3010214001583
59	Moskona Utara	Mosror	Rp 275,000,000	3010214001303
60	Moskona Utara	Meven	Rp 275,000,000	3010214001616
61	Moskona Utara	Mesyem Timur	Rp 275,000,000	3010214001513
62	Fafurwar	Manreima	Rp 275,000,000	3010214002655
63	Fafurwar	Tarofa	Rp 275,000,000	3010214002644
64	Fafurwar	Moniara	Rp 275,000,000	3010214002670
65	Fafurwar	Wararoma	Rp 275,000,000	3010214002972
66	Wamesa	Anakasi	Rp 275,000,000	3010214002622
67	Wamesa	Wasari	Rp 275,000,000	3010214002180
68	Manimeri	Idut	Rp 275,000,000	3010214002364
69	Manimeri	Tihibo	Rp 275,000,000	3010214002353
70	Manimeri	Tirasai	Rp 275,000,000	3010214002305
71	Manimeri	Muturi	Rp 275,000,000	3010214002342
72	Manimeri	Botay	Rp 275,000,000	3010214002316
73	Manimeri	Horna Baru	Rp 275,000,000	3010214002320
74	Manimeri	Manado	Rp 275,000,000	3010214002331
75	Manimeri	Rubobo	Rp 275,000,000	3010214002375
76	Sumuri	Onar Lama	Rp 275,000,000	3010214002773
77	Sumuri	Onar Baru	Rp 275,000,000	3010214002666
78	Sumuri	Padang Agoda	Rp 275,000,000	3010214002596
79	Dataran Beimes	Ahaura	Rp 275,000,000	3010214001023
80	Kuri	Awegro	Rp 275,000,000	3010214002493
81	Kuri	Otermta	Rp 275,000,000	3010214002482
82	Tuhiba	Wassowi	Rp 275,000,000	3010214001686
83	Tuhiba	Usemebij	Rp 275,000,000	3010214001690
84	Tuhiba	Duhumenau	Rp 275,000,000	3010214001664
85	Tuhiba	Cundu	Rp 275,000,000	3010214001712
86	Tuhiba	Mimcima	Rp 275,000,000	3010214001734
87	Tuhiba	Agomeda	Rp 275,000,000	3010214001701
88	Tuhiba	Inyesta	Rp 275,000,000	3010214001723
89	Tuhiba	Tikai	Rp 275,000,000	3010214001653
90	Tuhiba	Dehima Kali Biru	Rp 275,000,000	3010214001675
91	Kaitaro	Kawaf	Rp 275,000,000	3010214002902
92	Kaitaro	Furere	Rp 275,000,000	3010214002633
93	Biscoop	Mendesba	Rp 275,000,000	3010214002202
94	Biscoop	Biscoop	Rp 275,000,000	3010214002165
95	Biscoop	Dohija	Rp 275,000,000	3010214002191
96	Biscoop	Tomou	Rp 275,000,000	3010214002224
97	Biscoop	Meyaoid	Rp 275,000,000	3010214002235
98	Biscoop	Ijom	Rp 275,000,000	3010214002213
99	Biscoop	Memijem	Rp 275,000,000	3010214002246
100	Aroba	Wamme	Rp 275,000,000	3010214002176
101	Aroba	Air Terjun	Rp 275,000,000	3010214002154
102	Tomu	Adur	Rp 275,000,000	3010214001771
103	Tomu	Ayot	Rp 275,000,000	3010214001745
104	Tomu	Totitra	Rp 275,000,000	3010214001782
105	Tomu	Pera- Pera	Rp 275,000,000	3010214001804
106	Tomu	Sorodauni	Rp 275,000,000	3010214001756
107	Tomu	Tambanewa	Rp 275,000,000	3010214001793
108	Tomu	Wanagir	Rp 275,000,000	3010214001760
109	Moskona Barat	Mergined	Rp 275,000,000	3010214001911
110	Moskona Barat	Meyokda	Rp 275,000,000	3010214001933
111	Moskona Barat	Mefok	Rp 275,000,000	3010214001896
112	Moskona Barat	Meyah	Rp 275,000,000	3010214001863
113	Moskona Barat	Mosefa	Rp 275,000,000	3010214001852

114	Moskona Barat	Meretenej	Rp 275,000,000	3010214001874
115	Moskona Barat	Merok	Rp 275,000,000	3010214001885
116	Moskona Barat	Meserklir	Rp 275,000,000	3010214001900
117	Moskona Barat	Mahti	Rp 275,000,000	3010214001992
118	Moskona Barat	Inokra	Rp 275,000,000	3010214001944
119	Weriagar	Weriagar Selatan	Rp 275,000,000	3010214000614
120	Masyeta	Mosusuga	Rp 275,000,000	3010214001222
121	Masyeta	Meygera	Rp 275,000,000	3010214001281
122	Masyeta	Meyosa	Rp 275,000,000	3010214001620
123	Masyeta	Mermey	Rp 275,000,000	3010214001642
124	Masyeta	Onom	Rp 275,000,000	3010214001631
125	Masyeta	Mayefeb	Rp 275,000,000	3010214001255
126	Masyeta	Imuj	Rp 275,000,000	3010214001270
127	Masyeta	Esnam	Rp 275,000,000	3010214001233
128	Masyeta	Makuefeb	Rp 275,000,000	3010214001266
129	Masyeta	Makira	Rp 275,000,000	3010214001244
130	Masyeta	Meyaar	Rp 275,000,000	3010214002132
131	Kamundan	Maroro	Rp 275,000,000	3010214002110
132	Meyado	Kali Hitam	Rp 275,000,000	3010214002294
133	Meyado	Kaibur	Rp 275,000,000	3010214002261
134	Meyado	Dagu	Rp 275,000,000	3010214002272
135	Meyado	Meyado II	Rp 275,000,000	3010214002283
136	Meyado	Manofi	Rp 275,000,000	3010214002250
137	Moskona Timur	Meyera	Rp 275,000,000	3010214001594
138	Moskona Timur	Meyet	Rp 275,000,000	3010214001060
139	Moskona Timur	Inisini	Rp 275,000,000	3010214001045
140	Moskona Timur	Mosoimen	Rp 275,000,000	3010214001524
141	Moskona Timur	Injeif	Rp 275,000,000	3010214001561
142	Moskona Timur	Isurkahmey	Rp 275,000,000	3010214001546
143	Moskona Timur	Mesrey	Rp 275,000,000	3010214001550
144	Moskona Timur	Merenefa	Rp 275,000,000	3010214001093
145	Moskona Timur	Kaibur	Rp 275,000,000	3010214001535
JUMLAH TOTAL			Rp 39,875,000,000	

BUPATI TELUK BINTUNI,

tanda tangan

PETRUS KASIHAW

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

 Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.
 NIP. 19770103 200909 1 001